

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah merupakan aktor penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi publik. Setiap kebijakan yang dibuat akan dilaksanakan oleh seluruh elemen pemerintahan dengan pembagian tugas secara terus menerus dan dilakukan secara kerjasama. Salah satu tugas penting pemerintah adalah mewujudkan masyarakat makmur, sejahtera secara adil dan merata. Kesejahteraan suatu Negara dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat akan berpengaruh terhadap meningkatnya pembangunan. Dimensi pembangunan memiliki cakupan yang luas yakni meliputi bidang wilayah, sumberdaya alam, kependudukan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (Suryono, 2010:4). Negara berkembang seperti Indonesia, pembangunan biasanya difokuskan pada bidang ekonomi dan sosial. Namun, terjadinya perubahan sosial tidak akan mempunyai arti apabila tidak memiliki nilai tambah secara ekonomi (Suryono, 2010: 2).

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas jaringan kerja dan mengupayakan distribusi pendapatan secara adil. Salah satu indikator pembangunan ekonomi Indonesia diukur dari pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDB (Produk Domestik Bruto). Tujuan utama dari pembangunan ekonomi tidak hanya dilihat dari penambahan PDB, namun lebih kepada pemerataan ekonomi

untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Salah satu cara yang dikembangkan pemerintah dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Keberadaan usaha kecil dan menengah menjadi wujud nyata dari pelaksanaan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Tugas dan wewenang dari pemerintah dalam pengembangannya terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang menyatakan bahwa terdapat dua pendekatan utama dalam pengembangan UMKM. Pertama, penciptaan iklim usaha, serta pembinaan dan yang kedua adalah pengembangan. Iklim usaha adalah kondisi dimana pemerintah mengusahakan dengan mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha kecil dan menengah memperoleh kepastian, kesempatan, dan dukungan berwirausaha yang seluas-luasnya. Sementara pembinaan dan pengembangan adalah upaya perkuatan unit usaha untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha agar menjadi unit usaha yang tangguh dan mandiri. Kriteria dan klasifikasi usaha kecil dan menengah terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

No	Usaha	Kriteria	
		Aset	Omset
1.	Usaha Mikro	Maks. 50 juta	Maks. 300 Juta
2.	Usaha Kecil	>50 Juta-500Juta	>300Juta-2,5 Milyar
3.	Usaha Menengah	>500 Juta-10 Milyar	>2,5 Milyar-50 Milyar

Sumber: Dokumen Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2008

Usaha kecil dan menengah dalam perekonomian Indonesia memiliki peran yang penting dan strategis. Pertama, karena mampu menjadi usaha yang dapat bertahan dalam krisis ekonomi. Kedua, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Ketiga, potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja yang berpengaruh terhadap pengurangan jumlah pengangguran. Keempat, kontribusi dalam pembentukan PDB yang baik (Paramasari, 2009:3). Berikut adalah data perkembangan jumlah UMKM di Indonesia Tahun 2010-2013:

Tabel 2. Data Perkembangan Jumlah UMKM di Indonesia Tahun 2010-2013

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah UMKM	Unit	54.114.821	55. 206. 444	56.534.592	57.895.721
2.	Pertumbuhan jumlah UMKM	Persen	2,56	2,02	2,41	2,41
3.	Jumlah tenaga kerja UMKM	Orang	98.238.913	101.722.458	107.657.509	114.114.082
4.	Pertumbuhan jumlah tenaga kerja	Persen	2,13	3,55	5,83	6,03
5.	Sumbangan PDB (harga berlaku)	Rp. Miliar	3.411.574.7	4.321.830	4.869.568.1	5.440.007.9
6.	Pertumbuhan sumbangan PDB UMKM	Persen	14,89	26,68	12,67	11,71

Sumber: Dokumen Kementerian Koperasi dan UMKM RI, 2014

Berdasarkan pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa perkembangan usaha kecil dan menengah dari tahun 2010-2013 terus meningkat. Jumlah UMKM di tahun 2013 mencapai 57.895.721 unit dengan pertumbuhannya mencapai 2,41 persen dibandingkan di tahun 2010 yang jumlahnya 54.114.821 unit dengan pertumbuhannya sebesar 2,56 persen. Hal ini berdampak pada pertumbuhan jumlah penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan sumbangan Produk Domestik Bruto (PDB).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan representasi rakyat Indonesia dalam kehidupan ekonomi nasional, sehingga perlu diberikan prioritas yang tinggi dalam pembangunan nasional. Hal ini sebaiknya dilakukan pada daerah dengan tingkat perekonomian menengah ke bawah. Oleh karena itu, perlu disusun strategi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terintegrasi, sistematis dan berkelanjutan.

Pengembangan usaha kecil dan menengah bukan hanya tugas pemerintah pusat namun juga tanggung jawab pemerintah daerah sebagai *stakeholder* dalam pencapaian Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut pemerintah daerah untuk dapat mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan masing-masing menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pembagian urusan pemerintahan daerah di bidang UMKM pada tingkat Kabupaten/Kota hanya pada tingkat usaha mikro dan pada tingkat kecil, menengah merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi dan pusat. Tugas dan wewenang dari pemerintah daerah meliputi pemberdayaan yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Sedangkan pengembangan meliputi pengembangan usaha menurut kriteria dan menjadikan skala usaha yang lebih tinggi.

Provinsi Jawa Timur merupakan daerah dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Laju pertumbuhan penduduk tersebut berpengaruh terhadap tingginya sektor industri dan UMKM. Berikut adalah jumlah UMKM di Provinsi Jawa Timur menurut sektor/lapangan usaha tahun 2016:

Tabel 3. UMKM Jawa Timur Menurut Sektor/Lapangan Usaha Tahun 2016

No.	Sektor/Lapangan Usaha	Jumlah (Satuan)
1.	Pertanian	4.112.443
2.	Pertambangan dan penggalian	26.680
3.	Industri pengolahan	356.047
4.	Listrik, gas dan air	12
5.	Konstruksi	16.789
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	1.720.042
7.	Transportasi	174.541
8.	Keuangan	8.035
9.	Jasa-jasa	411.342
Jumlah		6.825.931

Sumber: Data Sekunder diskopumkm2016 (Diakses dari jatimprov.go.id), 2016

Berdasarkan pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa jumlah UMKM di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 mencapai 6.825.931 lapangan usaha. Dapat dilihat bahwa di Jawa Timur masih didominasi oleh sektor pertanian dengan jumlah 4.112.443 lapangan usaha. Namun dalam perkembangannya, sektor perdagangan mengalami pertumbuhan dengan jumlah 1.720.042 dibanding dengan tahun 2015 sebesar 1.340.101. Hal ini dikarenakan laju pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur yang tinggi. Salah satu daerah yang mendukung perkembangan bidang usaha kecil dan menengah adalah Kabupaten Pacitan.

Kabupaten Pacitan sebagai daerah berkembang di Jawa Timur memiliki jenis UMKM yang cukup beragam. Tercatat pada tahun 2016, jumlah UMKM Kabupaten Pacitan mencapai 181.115 unit dan menyerap tenaga sebanyak 221.784 pekerja (diskopumkm.jatimprov.go.id, 2016). Jenis usaha kecil dan

menengah di Kabupaten Pacitan bermacam-macam diantaranya adalah kerajinan batik, kerajinan batu akik, batu mulia, produksi gula merah, gerabah, olahan ikan, olahan kayu, olahan ketela dan anyaman bambu. Beberapa produk menjadi unggulan UMKM Kabupaten Pacitan diantaranya adalah kerajinan batik dan olahan ikan laut (Pacitanku.com, 2015).

Salah satu produk unggulan usaha mikro di Pacitan adalah kerajinan batik. Salah satu daerah produksi batik terbesar berada di Lorok Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Batik Lorok diproduksi di beberapa desa di Kecamatan Ngadirojo diantaranya adalah Desa Bogoharjo, Desa Cokrokembang dan Desa Wiyoro. Letaknya berada di 40 Km sisi timur dari pusat kota Kabupaten Pacitan. Batik ini memiliki keunikan dan berbeda dari batik lainnya. Batik Lorok menggunakan bahan pewarna alami dengan memanfaatkan bahan lokal seperti akar dan kulit kayu mahoni. Corak dari batik lorok juga menggunakan corak dari tanaman dan dedaunan di lingkungan sekitar. Saat ini terdapat sepuluh produksi dan telah menyerap sebanyak 424 tenaga kerja. Berikut merupakan tabel sepuluh produksi UMKM batik lorok, tenaga kerja serta jumlah produksi Tahun 2016:

Tabel 4. Produksi Batik Lorok, Tenaga Kerja dan Jumlah Produksi Tahun 2016

No	Nama Produksi	Tenaga Kerja (Orang)	Jumlah Produksi (Potong)
1.	Canting Jaya II	87	5.850
2.	Puspita	42	980
3.	Canting Jaya I	20	1.200
4.	Canting Mas	15	670
5.	Anthera	30	860
6.	Puri	104	6.630
7.	Tengah Sawah	37	990
8.	Mantrean	14	430
9.	Puri Putri	65	4.560
10.	Mira	10	450
Jumlah		424	22.620

Sumber: Dokumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.Pacitan, 2016

Pengembangan batik Lorok sebagai salah satu usaha mikro terdapat dalam Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan tahun 2011-2016 yang sekarang adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang dimuat pada pengembangan UMKM. Rencana strategis dibuat bertujuan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kinerja pemerintahan. Sejalan dengan prinsip otonomi daerah, serta mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, maka Pemerintah Kabupaten Pacitan menyusun program dan kegiatan yang berkaitan dengan proses pengembangan usaha kecil dan menengah. Program dan kegiatan tersebut meliputi penciptaan iklim usaha yang kondusif, pengembangan

kewirausahaan dan keunggulan kompetitif bagi usaha kecil dan menengah serta pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM.

Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merumuskan kebijakan dan program sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya. Namun, dalam pelaksanaan pengembangan UMKM di Kabupaten Pacitan masih terdapat beberapa permasalahan dalam bidang pemasaran dan produksi antara lain minimnya inovasi dan pengembangan produk, hasil dari produksi masih sulit tembus pasar luar daerah. Hal ini dikarenakan masih minimnya program pendampingan usaha atau *capacity building* oleh pemerintah yang mengakibatkan produksi sulit mendapatkan jaringan pemasaran. Selain itu juga masih minimnya bantuan dari pemerintah dan jumlahnya juga terbatas (Budi, 2016: 38).

Pengembangan batik Lorok masih memiliki beberapa kendala terkait harga, dimana harga jual batik lorok lebih mahal dibandingkan dengan batik Pacitan lainnya. Kemudian, jarak produksi batik dengan pusat kota yang terlalu jauh dan beberapa produksi batik Lorok yang masih memiliki akses jalan kurang baik. Hal ini menyebabkan kurangnya minat pembeli untuk datang langsung ke tempat produksi. Kemudian bantuan yang diberikan pemerintah kepada pengusaha batik Lorok dan pelaku usaha lainnya yang terus menerus menyebabkan ketergantungan bantuan pemerintah. Minimnya pemasaran secara online dan kurangnya akses informasi yang lengkap. Hal ini disebabkan belum adanya paguyuban pengrajin batik lorok Pacitan sehingga belum terciptanya struktur pemasaran yang baik minimnya program pendampingan usaha, harga jual yang lebih mahal dari batik Pacitan lainnya serta akses jalan menuju tempat produksi

batik lorok yang rusak. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian dan evaluasi kembali dengan memfokuskan pada identifikasi masalah serta isu-isu strategis yang berkembang. Sehingga akan diketahui dengan jelas mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengembangan usaha kecil dan menengah batik Lorok. Berdasarkan gambaran yang diperoleh, diharapkan mampu mengarahkan pengelolaan dan pengoptimalan perencanaan sehingga penanganan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan Visi, Misi yang ada pada Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Strategi Perencanaan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Batik Lorok Pacitan (Studi Pada Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pacitan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi perencanaan pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM Batik Lorok Pacitan ?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam strategi perencanaan pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM Batik Lorok Pacitan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis strategi perencanaan pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM Batik Lorok Pacitan.
2. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat strategi perencanaan pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM Batik Lorok Pacitan.

D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa perkembangan dan kemajuan untuk Fakultas Administrasi khususnya Minat Perencanaan Pembangunan.

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, pemikiran ilmu pengetahuan dalam perencanaan strategis pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM

b. Bagi instansi yang terkait

Sebagai bahan kajian dan sumbangsih pemikiran bagi pemerintah Kabupaten Pacitan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan

dengan pengembangan UMKM di Kabupaten Pacitan khususnya pada sektor batik.

c. Bagi masyarakat umum

Sebagai sarana sosialisasi mengenai pengembangan UMKM dan bahan kajian informasi sebagai media promosi sektor batik Pacitan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun dengan antar bab saling berkaitan. Sistematika penulisan tersebut antara lain sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, yang berisi mengenai belum berkembangnya UMKM yang ada di Kabupaten Pacitan khususnya sektor Batik Lorok . Rumusan masalah berisi tentang strategi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengembangkan produk UMKM Batik Lorok serta faktor pendorong dan penghambat dalam pengembangan produk UMKM Batik Lorok. Tujuan penelitian untuk menjawab masalah yang dirumuskan agar dapat mengetahui masalah yang terjadi dan apa saja strategi yang digunakan pemerintah dalam pengembangan produk UMKM batik lorok. Kontribusi penelitian, berisi tentang kontribusi bagi Universitas Brawijaya khususnya Fakultas Ilmu Administrasi, peneliti, instansi yang terkait dan masyarakat umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memuat teori-teori yang mendukung yaitu teori tentang administrasi publik, administrasi pembangunan, strategi, perencanaan strategi, pemerintah daerah, manajemen strategi, dan pengembangan UMKM.

BAB III METODE PENELITIAN

Memuat metode penelitian terkait dari awal pengerjaan skripsi hingga akhir yang berisi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara garis besar, isi dari bab ini adalah strategi perencanaan pemerintah dalam pengembangan UMKM batik lorok Pacitan berdasarkan lima proses perencanaan strategis yang disesuaikan dengan Rencana strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yaitu 1) memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis meliputi pengembangan kemampuan, peningkatan SDM, teknologi pengetahuan, akses permodalan, pemasaran dan promosi serta pengembangan sarana usulan; 2) memperjelas mandat organisasi meliputi perlindungan konsumen dan peningkatan penggunaan dalam negeri; 3) memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi yang berfokus pada terciptanya usaha mikro yang mandiri dan berdaya saing; 4) menilai lingkungan eksternal

meliputi ancaman berupa harga jual batik yang tinggi dan akses jalan menuju tempat produksi yang rusak, kemudian peluang berupa penggunaan bahan alami dalam pembuatan batik lorok dengan motif dari hewan dan tumbuhan sekitar; 5) menilai lingkungan internal meliputi kekuatan yaitu adanya kerjasama dengan berbagai pihak swasta, kemudian kelemahannya adalah pemisahan instansi yang berdampak pada melemahnya kinerja organisasi. Terdapat dua faktor yaitu faktor pendukung terdiri dari internal dan eksternal serta faktor penghambat yang terdiri dari internal dan eksternal

BAB V PENUTUP

Berisikan tentang beberapa kesimpulan dan saran-saran yang diberikan oleh peneliti terhadap studi lanjutan berdasarkan hasil dari temuan peneliti.